

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KREDIT USAHA RAKYAT  
(KUR) DI BANK RAKYAT INDONESIA UNIT TANJUNG  
MORAWA KABUPATEN DELI SERDANG**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**RIRI NOVALINA PERONICA**

**168520039**



**ADMINISTRASI PUBLIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2020**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 9/3/21

Access From ([repository.uma.ac.id](http://repository.uma.ac.id))9/3/21

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KREDIT USAHA RAKYAT  
(KUR) DI BANK RAKYAT INDONESIA UNIT TANJUNG  
MORAWA KABUPATEN DELI SERDANG**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Medan Area

**OLEH:**

**RIRI NOVALINA PERONICA  
168520039**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**2020**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

ii

Document Accepted 9/3/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From ([repository.uma.ac.id](http://repository.uma.ac.id))9/3/21

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Di Bank Rakyat Indonesia Unit Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang

Nama Mahasiswa : Riri Novalina Veronica

NPM : 16.852.0039

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

  
Dr. Abdul Kadir, S.H., M.Si  
Pembimbing I

  
Drs. Indra Muda, MAP  
Pembimbing II



  
Neri Kusmanto, MA  
Dekan Fisip

  
Nina Angelia, S.Sos., M.Si  
Ka. Prodi Administrasi Publik

Tanggal Lulus : 24 Oktober 2020

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari berbagai sumber, telah di tuliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika dalam penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari di temukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 24 Oktober 2020



Riri Noalina Veronica  
16.852.0030

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riri Novalina Veronica  
NPM : 168520039  
Program Studi : Administrasi Publik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah Saya yang berjudul: Ipleentasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat di Bank Rakyat Indonesia Unit Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas skripsi Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan  
Pada tanggal: 24 Oktober 2020  
Yang Menyatakan



( Riri Novalina Veronica )

## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Tanjung Morawa pada tanggal 07 Nopember 1996 dari Ayahanda Toto Siswoyo dan Ibunda Lidiana Sintaria br.Snaga. Penulis merupakan putri pertama dari empat bersaudara.

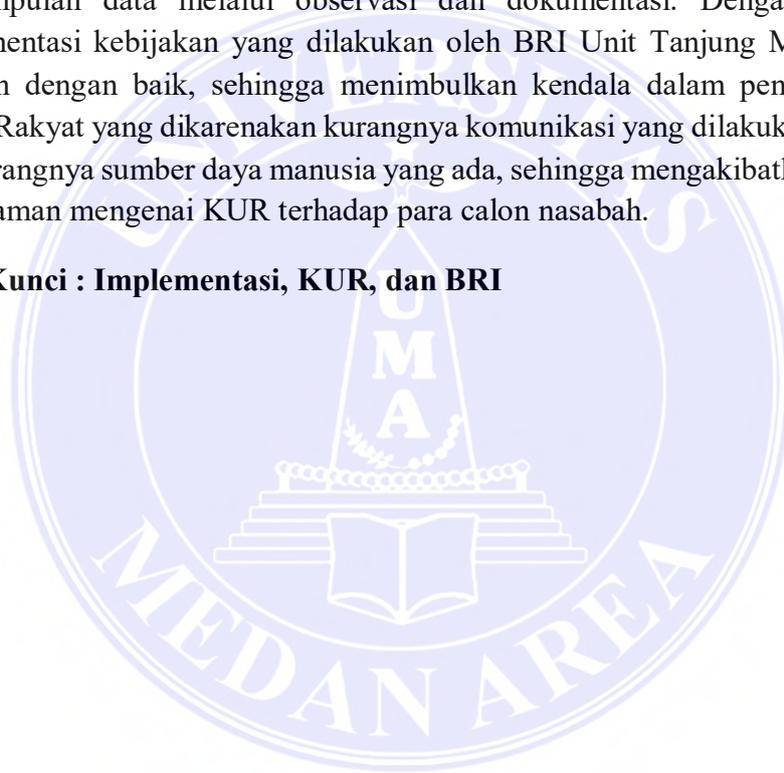
Pendidikan yang pernah di tempuh penulis adalah TK Methodist Tanjung Morawa, SD Swasta GKPS Bangun Tobing, SMP Negeri 1 Bangun Purba, SMK Farmasi YPFSU Medan. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikannya di Universitas Medan Area fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan program studi Administrasi Publik.

Selama mengikuti perkuliahan di fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, penulis berorganisasi di intra kampus sebagai anggota Paduan Suara Universitas Medan Area. Penulis melaksanakan praktek kerja lapangan (PKL) di Kantor Walikota Medan bagian sub bagian Kesejahteraan Rakyat.

## ABSTRAK

Peran perbankan dalam pembangunan ekonomi adalah mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi yaitu salah satunya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perseorangan atau badan usaha yang berada di daerah sekitar seperti didaerah tanjung morawa. Bank Rayat Indonesia adalah Bank pelaksana yang menyalurkan Kredit Usaha Rakyat Terbanyak. Hal ini dikarenakan Bank Rakyat Indonesia memiliki jaringan yang luas di dibandingkan dengan Bank pelaksana yang lainnya sehingga mudah dalam penyaluran kredit. Sehingga dilakukannya penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan serta permasalahan yang terjadi pada pemberian Kredit Usaha kepada nasabah di BRI Unit Tanjung Morawa. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi. Dengan kesimpulan Implementasi kebijakan yang dilakukan oleh BRI Unit Tanjung Morawa belum berjalan dengan baik, sehingga menimbulkan kendala dalam penyaluran Kedit Usaha Rakyat yang dikarenakan kurangnya komunikasi yang dilakukan pihak Bank dan kurangnya sumber daya manusia yang ada, sehingga mengakibatkan kurangnya pemahaman mengenai KUR terhadap para calon nasabah.

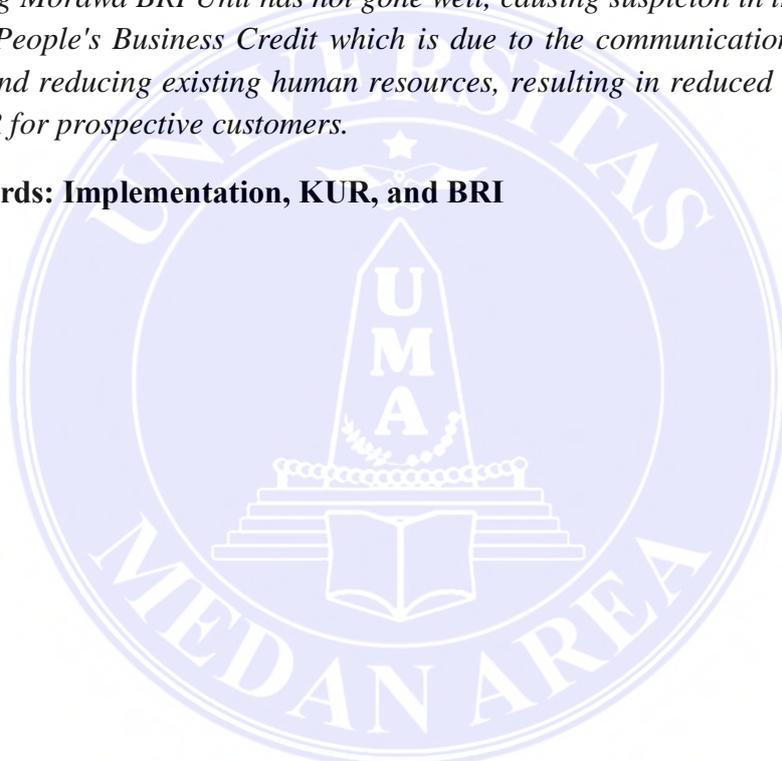
**Kata Kunci : Implementasi, KUR, dan BRI**



## **ABSTRACT**

*The role of banking in economic development is to channel funds for economic activities, one of which is in the form of credit for individual communities or business entities in the surrounding areas such as the Cape Morawa area. Bank Rayat Indonesia is an executing bank that distributes the most people's business loans. This is because Bank Rakyat Indonesia has a broad network compared to other implementing banks so that it is easy to distribute credit. So so so so that that aims to find out the implementation of policies and problems that occur in presenting Business Loans to customers at the Tanjung Morawa BRI Unit. This research method uses qualitative methods. Technique data through observation and documentation. By wrongly, the implementation of policies carried out by the Tanjung Morawa BRI Unit has not gone well, causing suspicion in the distribution of the People's Business Credit which is due to the communication made by the Bank and reducing existing human resources, resulting in reduced understanding of KUR for prospective customers.*

**Keywords: Implementation, KUR, and BRI**



## KATA PENGANTAR

Pada kesempatan ini pertama penulis mengucapkan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan proposal ini guna melengkapi tugas-tugas dan merupakan satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area. Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan proposal ini adalah **“Implementasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Unit Tanjung Morawa”**.

Penulis menyadari penyusunan proposal ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan baik dari segi moral dan material. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan cinta kasih kepada:

1. Bapak Dr. Heri Kusmanto, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Abdul Kadir, S.H, M.Si selaku pembimbing I penulis yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan arahan serta bimbingan dalam penyusunan proposal ini.
3. Bapak Drs. Indra Muda, MAP selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberi saran dan arahan dalam penyusunan proposal ini.
4. Ibu Hadiyanti Arini, S.Sos,MAP selaku sekretaris penulis yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan saran dan arahan dalam penyusunan proposal ini.
5. Kepada seluruh staff Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan politik yang

telah membantu penulis dalam urusan administrasi serta memberikan perkembangan informasi berupa jadwal di dalam pelaksanaan setiap acara kegiatan atau aktivitas di dalam penyelesaian proposal ini.

6. Kepada kedua Orang Tua Penulis, Papa tercinta Toto Siswoyo Dan Mama Tersayang Lidia Sintaria Sinaga yang telah memberikan semangat dan motivasi, membiayai dan memberikan doa yang tiada henti demi keberhasilan dan masa depan penulis.
7. Kepada ketiga adik tercinta Ayu Sri Hartini, Niki Albert Satrio, dan Steven Wiranata, yang telah mendukung penulis dan memberikan semangat serta doa dalam menyelesaikan proposal ini.
8. Teman seperjuangan Mahasiswa Administrasi Publik angkatan 2016 yang ikut serta memberikan doa dan dukungan.
9. Seluruh pihak yang ikut membantu dan selalu mendukung selama penyusunan proposal ini yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, karena masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun selalu penulis nantikan dari pihak manapun, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Oktober 2019  
Penulis

Riri Novalina Peronica  
168520039

# DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>i</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>6</b>
2.1 Uraian Teori.....	6
2.1.1 Pengertian Kebijakan .....	6
2.1.2 Pengertian Implementasi .....	6
2.1.3 Pengertian Implementasi Kebijakan .....	7
2.1.4 Pengertian Bank.....	11
2.1.4.1 Fungsi Bank .....	13
2.1.5 Pengertian Kredit .....	15
2.1.6 Unsur-Unsur Kredit .....	16
2.1.7 Jenis-jenis Kredit .....	17
2.1.8 Fungsi dan Manfaat Kredit Perbankan.....	19
2.1.9 Kredit Usaha Rakyat.....	20
2.1.10 Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit .....	21
2.1.11 KUR Mikro .....	23
2.1.12 Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) .....	24
2.2. Kerangka Pemikiran .....	26
2.3. Penelitian Sejenis .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>32</b>
3.1 Jenis penelitian .....	32
3.2 Lokasi Penelitian .....	32
3.3 Waktu Penelitian.....	33
3.4 Informan Penelitian.....	33

3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	33
3.6 Metode analisis Data.....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	37
4.1.1 Sejarah Bank Rakyat Indonesia.....	37
4.1.2 Sejarah BRI Unit Tanjung Morawa .....	40
4.1.3 Visi,dan Misi,Unit Tanjung Morawa .....	40
4.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi.....	42
4.1.6 Pelaksanaan Pemberian KUR .....	44
4.2 Pembahasan .....	49
4.2.1 Implementasi Kebijakan KUR di BRI Unit T.Morawa ..	49
4.2.2 Faktor Komunikasi .....	50
4.2.3 Faktor Sumberdaya.....	52
4.2.4 Faktor Disposisi.....	55
4.2.5 Faktor Struktur Organisasi.....	57
4.2.6 Permasalahan Dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat di BRI Unit Tanjung Morawa.....	58
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>60</b>
5.1 Simpulan.....	61
5.2 Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran .....	31
4.1.4 Gambar Struktur Organisasi BRI .....	41



# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang Masalah**

Peran perbankan dalam pembangunan ekonomi adalah mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi yaitu salah satunya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perseorangan atau badan usaha yang berada di daerah sekitar seperti yang terletak di daerah Tanjung Morawa. Kredit tersebut mempunyai suatu kedudukan yang strategis dimana sebagai salah satu sumber uang yang strategis dimana sebagai salah satu sumber uang yang diperlukan dalam membiayai kegiatan usaha yang dapat dititik beratkan sebagai salah satu kunci kehidupan bagi setiap manusia. Fasilitas kredit, yang diberikan oleh bank merupakan aset terbesar bagi bank. Dalam hal kegiatan bank memberikan fasilitas kredit, resiko kerugian sebagian besar bersumber pada kegiatan tersebut, sehingga bila tidak dikelola dengan baik dan disertai pengawasan yang memadai akan mengancam kelangsungan hidup bank tersebut.

Pemerintah melalui kementerian koordinator perekonomian dalam rangka perbedayaan usaha mikro kecil dan menengah pemerintah menerbitkan paket kebijakan yang bertujuan meningkatkan Sektor Rill dan memberdayakan usaha kecil dan menengah.

Pada tanggal 5 November 2007, presiden RI (SBY) meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), fasilitas penjamin an Kredit dari pemerintah melalui PT Askrindo dan perum Jamkrindo. Adapun Bank yang mengeluarkan Dana KUR yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Mandiri Syariah. BNI,BTN,Bank Bukopin.(Maesya Agung Akbar, 2015).

Peranan perusahaan penjamin dalam KUR adalah memberikan sebagian penjaminan terhadap Bank pelaksana atas KUR adalah memberikan sebagian penjaminan terhadap Bank pelaksana atas KUR yang diberikan kepada UMKMK. Meski begitu, debitur UMKMK tetap wajib melunasi KUR yang diterima dari Bank pelaksana. Adapun pihak yang membayar Imbal Jasa Penjamin (IJP).

Di antara beberapa Bank pelaksana yang menyalurkan KUR, BRI adalah Bank pelaksana yang menyalurkan KUR terbanyak. Hal ini di karenakan BRI memiliki jaringan yang luas dibandingkan dengan Bank pelaksana lainnya sehingga memudahkan dalam penyaluran kredit.

Dalam skripsi Akbar Agung Maesya (2015) yang berjudul Implementasi Kebijakan Program KUR Dalam Pembangunan UMKM di Kecamatan Wrunggunung Kabupaten Lebak, Ada beberapa peraturan yang menjadi landasan hukum Kredit Usaha Rakyat, yaitu sbb :

1. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang lembaga penjaminan
2. Inpres 6 tahun 2007 tanggal 8 maret 2007 tentang kebijakan percetakan Sektor Rill dan pemberdayaan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2008 tentang Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan bagi UMKMK.
4. Perjanjian kerja sama antara Bank pelaksana dengan lembaga penjamin.
5. Standar Operasional dan prosedur pelakasana KUR
6. Adendum II MoU Departemen teknis, perbankan, dan perusahaan penjaminan yang ditanda tangani pada tanggal 12 januari 2010.

7. Keputusan Deputi Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : ke-01/D.I.M.EKON/01/2010 tentang standar operasional dan prosedur pelaksanaan kredit usaha rakyat.

Fenomena yang saya teliti berdasarkan wawancara dengan bapak Undangenta Ginting, pada tahun 2018 nasabah pembiayaan KUR dengan berbagai sektor-sektor diberikan pembiayaan yang setiap sektornya berbeda-beda dari data sektor yang saya teliti tersebut yang paling banyak diberikan pembiayaan KUR adalah sektor perdagangan yang berjumlah 174 nasabah.

Menurut studi pendahuluan (prasarvei) nampaknya masih terdapat beberapa kelemahan atau permasalahan dan implementasi kebijakan KUR mikro ini pada Bank pelaksana. Dari wawancara awal dengan beberapa pelaku usaha mikro calon debitur dan debitur KUR mikro, ada beberapa hal yang di keluhkan berkenaan dengan implementasi KUR mikro yaitu seperti yang disampaikan oleh pedagang pasar tradisional atau UMKM setempat tidak terlalu banyak masalah saat pengambilan KUR di BRI Unit Tanjung Morawa, namun menurut Bapak Gito salah satu pedagang telur di pasar tradisional Tanjung Morawa tepatnya di jl.pajak inpress, kesulitan yang mereka alami saat pengambilan KUR adalah persyaratan yang diminta oleh pihak Bank itu sendiri. Persyaratan seperti agunan, namun agunan yang diberikan juga belum tentu mendapatkan jumlah KUR yang diajukan pelanggan/nasabah itu sendiri. Dan kebanyakan pelanggan/nasabah mengetahui adanya KUR ini hanya melalui sesama nasabah, dan dari pihak Bank sendiri tidak pernah melakukan sosialisasi soal KUR di depan halaman Bank saja, sehingga banyak masyarakat yang tidak memahami soal pengambilan/pengajuan KUR ini.

Kurangnya karyawan BRI setempat menjadi salah satu pemicu dari tidak dilakukan sosialisasi mengenai adanya KUR ini.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar belakang diatas penulis mengambil rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Kredit Usaha Rakyat Mikro di Unit BRI Tanjung Morawa?
2. Apa permasalahan yang terjadi dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat di BRI Unit Tanjung Morawa?

## **1.3. Tujuan Masalah**

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan yaitu :

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program KUR Mikro di BRI Unit Tanjung Morawa.
2. Untuk Mengetahui permasalahan yang terjadi dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat di BRI Unit Tanjung Morawa.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah:

1. Bagi penulis untuk menambah pengalaman peneliti dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan, dan dapat melihat permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan khususnya mengenai Implementasi Kebijakan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di BRI Unit Tanjung Morawa.
2. Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi instansi yang diteliti, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi seluruh karyawan BRI Unit Tanjung Morawa.
4. Diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat sekitar terutama daerah Tanjung Morawa tentang pengurusan KUR di BRI.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Uraian Teori**

##### **2.1.1. Pengertian Kebijakan**

Menurut Titmuss Dalam Edy Suharto (2015 : 7) kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu.

Menurut Tangkilisan Nogi Hesel S (2003:19) Kebijakan publik Yang Membumi. kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

##### **2.1.2. Pengertian Implementasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah implementasi mempunyai arti pelaksanaan/penerapan.

Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).

Menurut Deddy mulyadi, (2016 : 24) Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Banyak kebijakan yang baik yang mampu dibuat oleh pemerintah, tetapi kemudian ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan Negara tersebut karena tidak dilaksanakan.

Menurut Gordon dalam Pasolong Dalam Deddy Mulyadi (2016 : 24) Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.

##### **2.1.3. Pengertian Implementasi Kebijakan**

Menurut Pressman Wildavsky dalam Tangkilisan (2003 :17), implementasi diartikan sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana tindakan dalam hubungan kausal antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya. Implementasi mengatur kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program kedalam tujuan kebijakan yang diinginkan.

Van Master dan Van Horn dalam Budi Winarno (2005:102) merumuskan implementasi kebijakan public sebagai: “Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam serangkaian keputusan sebelumnya. Implementasi kebijakan di perlukan mengacu pada pandangan para pakar bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat harus dimple mpentasikan. Oleh karena itu implementasi kebijakan diperlukan karena berbagai alasan atau perspektif.

Berdasarkan prespektif masalah kebijakan sebagaimana yang diperkenalkan oleh Edward III (1984 9-10), Implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan.

Menurut Tahir (2014:61-62),”keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh banyak faktor, dan masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain. Pemahaman tentang berbagai faktor yang terkait di dalam implementasi ini dielaborasi beberapa teori implementasi kebijakan dan dijadikan sebagai alasan.”

Dalam tindakan pengkajian implementasi kebijakan, Edwards mulai dengan mengajukan dua buah pertanyaan, yaitu: prakondisi apa yang diperlukan sehingga suatu implementasi kebijakan berhasil. Kedua, hambatan utama apa yang mengakibatkan suatu implementasi gagal. Menurut, Edwards, untuk menjawab

pertanyaan penting itu, maka Edwards III menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor atau variabel dalam mengimplementasikan kebijakan public. Faktor-faktor atau variabel tersebut adalah komunikasi, sumberdaya, Disposisi dan struktur birokrasi. Edward III menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel tersebut, yaitu :

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, maka yang harus bertanggung jawab terhadap implementasi sebuah kebijakan tersebut kebijakan harus di sampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten kepada orang-orang yang mampu. Komunikasi menunjukkan peranan sebagai acuan agar pelaksanaan kebijakan mengetahui persis apa yang mereka kerjakan. Bahwa komunikasi juga dinyatakan sebagi perintah dari atasan terhadap para implementor kebijakan sehingga penerapan kebijakan tidak keluar dari sasaran yang dikehendaki.
2. Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah di komunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumberdaya finansial baik berupa sarana dan prasarana penunjang kebijakan agar

terlaksana dengan baik. Sumberdaya yang dimiliki organisasi diartikan sebagai kemampuan atau nyawa dari organisasi itu.

3. Disposisi, setiap implementor merupakan faktor penting dalam pendekatan studi implementasi kebijakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau prespektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
4. Struktur Organisasi, struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure (SOP)*. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Meskipun sumberdaya untuk mengimplementasikan kebijakan telah mencukupi dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan serta bersedia melaksakannya juga masih terhambat oleh inefisiensi struktur birokrasi.

Menurut pandangan Edwards sumber- sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik

untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul diatas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan public (Budi Winarno,2008:181).

Menurut Edwards, ada dua karakteristik utama dari birokrasi yaitu prosedur-proedur kerja atau sering disebut *Standard Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi. Yang pertama, berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari pada implementor serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi yang kompleks dan tersebar,. Yang kedua, berasal terutama dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislative, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi Negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah. Di Indonesia sering terjadi infektivitas implementasi kebijakan karena kurangnya koordinasi dan kerja sama di antara lembaga-lembaga Negara dan/pemerintah.

#### **2.1.4 Pengertian Bank**

Menurut Dr.Kasmir (2014 : 24), Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam

bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya.

Menurut Taswan (2005 :2) Bank adalah lembaga perantara keuangan atau pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana, serta berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran dengan berpihak sasaran kepercayaan.

Menurut Balck Henry Campbell, dalam Hermansyah (2008:30), memberi arti kepada bank sebagai suatu institusi yang mempunyai peran besar dalam dunia komersil yang mempunyai wewenang untuk menerima deposit, memberi pinjaman, menerbitkan *promissory notes* yang sering disebut dengan *bank bills* atau *bank notes*, namun demikian fungsi yang original adalah hanya menerima deposito berupa uang logam, *plate*, emas, dan lain-lain.

Menurut undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998 Bab I tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dalam Ikatan Akuntan Indonesia, (2007 :3.1) Peran bank sebagai lembaga keuangan juga dinyatakan dalam PSAK No 31 bahwa bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dan pihak yang memerlukan dana (*deficit unit*), serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.

Dalam hukum perbankan dikenal beberapa prinsip operasional perbankan yaitu:

1. Prinsip kepercayaan

Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara nasabah dengan bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.

2. Prinsip Kehati-hatian Prinsip Kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatannya baik dalam menghimpun dana maupun menyalurkan dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilaksanakannya prinsip kehati-hatian ini adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku.

3. Prinsip Kerahasiaan Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai Pasal 47 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 40 ayat (1) menjelaskan : “ Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A”.

4. Prinsip Mengenal Nasabah Prinsip pengenalan nasabah merupakan prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Tujuan prinsip ini adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan serta menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan.

#### **2.1.4.1 Fungsi Bank**

Secara sempit fungsi bank yaitu sebagai alat penarik uang kartal dan uang giral dari masyarakat dan menyalurkannya ke masyarakat.

Fungsi bank yang utama ada 3 yaitu :

1. Bank berfungsi sebagai alat untuk menghimpun dan menyalurkan kepada masyarakat.
2. Fungsi bank yaitu memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi suatu Negara, dengan menghimpun dana dari masyarakat untuk berinvestasi terhadap pembangunan Negara.
3. Bank berfungsi sebagai lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang berupa jasa pelayanan perbankan kepada masyarakat agar masyarakat merasa nyaman dan aman di dalam menyimpan dananya tersebut.

,Menurut Muljono Dalam Tika Dwi Nur Atin (2018), dalam menetapkan kebijaksanaanya bank pada umumnya memperhatikan tiga hal yaitu:

1. Asas Likuiditas, yaitu suatu asas yang mengharuskan bank untuk tetap dapat menjaga tingkat likuiditasnya, karena suatu bank yang tidak likuid akibatnya akan sangat parah yaitu hilangnya kepercayaan bagi para nasabahnya atau dari masyarakat luas.
2. Asas Rentabilitas. Sebagaimana halnya pada setiap kegiatan usaha akan selalu mengharapkan untuk memperoleh laba. Laba yang diperoleh dari perkreditan berupa selisih antara biaya dana dengan pendapatan bunga yang diterima dari pada debitur. Jadi rentabilitas dapat diartikan kesanggupan bank untuk memperoleh laba atau keuntungan.
3. Asas Solvabilitas, usaha pokok perbankan adalah menerima simpanan dana dari masyarakat dan disalurkan dalam bentuk kredit. Dalam kebijaksanaannya perkreditan maka bank harus pandai mengatur penanaman dana ini baik pada bidang perkreditan, surat berharga pada tingkat risiko kegagalan sekecil mungkin.

### 2.1.5 Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu *Credere* artinya kepercayaan, dan bahasa Latin *Creditum* yang artinya kepercayaan akan kebenaran. Oleh karena itu dasar dari pemberian kredit adalah kepercayaan.

(<http://id.shvoong.com/business-management/1988528-kredit>)

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998, penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pada dasarnya kredit adalah sejumlah pinjaman uang yang diberikan oleh bank kepada pelaku ekonomi yang menunjang pembangunan yang dilaksanakan dan guna ikut mesukseskan program pemerintah. Pembangunan yang dilaksanakan dapat berwujud pembangunan disektor pertanian, perkebunan, dan sebagainya.

Menurut Ahmad Subagyo (2017 : 46), Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Kasmir (2014 : 85) Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank pihak peminjam yang mewajibkan kedua belah pihak untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Rahmad Firdaus (1985:12) dalam buku Analisa Kredit, menyebutkan yang dimaksud dengan kredit adalah penyerahan sesuatu yang berharga kepada pihak lain, apakah uang, barang atau jasa dengan janji, bahwa di hari tertentu penerimanya akan membayarnya secara ekivalen/sebanding

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kredit merupakan kesepakatan kedua belah pihak untuk saling memberi dan menerima sesuatu dimana pada saat tertentu pihak penerima harus membayar pokok dan anti rugi atas dan yang dipinjamkannya. Besarnya ganti rugi( bunga) dan syarat-syarat penarikan dan atau pembayaran biasanya dituangkan dalam bentuk akte perjanjian kredit.

### **2.1.6 Unsur-Unsur Kredit**

a. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang

b. Kesepakatan

Disamping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit.

c. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

d. Risiko

Ada suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit.

e. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga.

### 2.1.7 Jenis-Jenis Kredit

Berikut jenis-jenis kredit menurut Kasmir (2014: 90-91) yang dilihat dari berbagai segi antara lain:

#### 1. Dilihat dari segi kegunaan

##### a. Kredit investasi

Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.

##### b. Kredit modal kerja

Digunakan untuk keperluan meningkat produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

#### 2. Dilihat dari segi tujuan kredit

##### a. Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang dan jasa.

##### b. Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

##### c. Kredit Perdagangan

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada

supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar

### 3. Dilihat dari segi jaminan

#### a. Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.

#### b. Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini.

### 2.1.8 Fungsi dan Manfaat Kredit Perbankan

Fungsi kredit perbankan dapat dirasakan baik oleh dunia usaha maupun bagi lembaga keuangan pemberi kredit tersebut. Bagi dunia usaha, kredit dapat berfungsi sebagai:

1. Sebagai sumber permodalan untuk menjaga kelangsungan atau meningkatkan usahanya.
2. Pengambilan kredit wajib dilakukan tepat waktu, diharapkan dapat diperoleh dari keuntungan usahanya.

Selain itu juga, pemberian kredit perbankan dapat bermanfaat bagi debitur atau penerima pinjaman dan juga bermanfaat bagi lembaga keuangan sebagai pemberi kredit.

Bagi lembaga atau budang usaha:

1. Memberi keuntungan usaha dengan adanya tambahan modal dan berkembangnya usaha.
2. Dapat memberikan peningkatan pendapatan bagi pengusaha untuk mengembangkan usahanya.

Bagi lembaga keuangan, kredit dapat berfungsi sebagai pemberi keuangan dari selisih bunga pemberian kredit atau jasanya lainnya.

### **2.1.9 Kredit Usaha Rakyat**

KUR adalah Skema krdit/pembiayaan yang khusus diperuntukkan bagi UMKM dan koperasi yang usahanya layak namun tidak mempunyai agunan yang cukup sesuai persyaratan yang ditetapkan perbankan. Tujuan akhir diluncurkan Program KUR adalah meningkatkan perekonomian, pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja perguliran KUR dimulai dengan adanya keputusan sidang Kabinet Terbatas yang diselenggarakan pada tanggal 9 maret 2007 bertempat di Kantor Kementerian Negara koperasi dan UKM dipimpin Presiden RI. Salah satu agenda keputusannya antara lain, bahwa dalam rangka pengembangan usaha UMKM dan Koperasi kepada kredit/pembiayaan dari perbankan melalui peningkatan kapasitas perusahaan penjamin. Dengan demikian UMKM dan Koperasi yang selama ini mengalami kendala dalam mengakses kredit/pembiayaan dari perbankan karena kekurangan agunan. (Ahmad Subagyo 2017:53)

Skema KUR:

Secara umum Skema KUR yang telah disepakati Bank pelaksana dengan perusahaan penjamin dan pemerintah sebagai berikut:

1. Nilai Kredit maksimal Rp500 juta per debitur.
2. Bunga maksimal 16% per tahun (efektif).
3. Pembagian risiko penjaminan 70% dan Bank pelaksana 30%.
4. Penilaian kelayakan terhadap usaha debitur sepenuhnya menjadi kewenangan Bank pelaksana.
5. UMKM dan Koperasi tidak dikenakan Imbal Jasa Penjaminan (IJP)

#### **2.1.10 Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit**

- a. Pengertian Perjanjian Kredit Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa sifatnya yang konsensual dari suatu perjanjian kredit bank itulah yang merupakan ciri pertama yang membedakan dari perjanjian peminjaman uang yang bersifat riil. Perjanjian kredit adalah perjanjian loan of money menurut hukum Inggris yang dapat bersifat riil maupun konsensual tetapi bukan perjanjian peminjaman uang menurut hukum Indonesia yang bersifat riil. (Sutan Remy Sjahdeini, 1993: 158)
- b. Bentuk Perjanjian Kredit Undang-Undang Perbankan yang telah diubah tidak menentukan bentuk perjanjian kredit, berarti bahwa pemberian kredit bank dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Secara umum dalam praktek perbankan, perjanjian kredit dituangkan dalam bentuk tertulis dan dalam perjanjian baku. Perjanjian kredit banknya bisa dibuat di bawah tangan dan bisa secara notarial. Praktek

perbankan yang demikian ini berdasarkan pada ketentuan sebagai berikut : 1) Instruksi Presiden Nomor 15/IN/10/66 tentang Peoman Kebijakan di Bidang Perkreditan jo SE Bank Negara Indonesia Unit I Nomor 2/539/UPK/Pemb., SE v Bank Negara Indonesia Unit I Nomor 2/649/UPK/Pemb dan Instruksi Presidium Kabinet Nomor 10/EK/2/1967 yang menyatakan bahwa bank dilarang melakukan pemberian kredit dalam berbagai bentuk tanpa adanya perjanjian kredit yang jelas antara bank dan nasabah. 2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum yang menyatakan bahwa setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis. (Rachmadi Usman, 2001:263-264)

c. Perjanjian Kredit sebagai Perjanjian Baku Perjanjian kredit merupakan perjanjian baku dimana isi atau klausula perjanjian kredit tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir (blanko), tetapi tidak terikat dalam suatu bentuk tertentu. Keabsahan perjanjian kredit terletak pada penerimaan masyarakat dan lalu lintas bisnis untuk memperlancar arus lalu lintas perdagangan dan bisnis. Perjanjian baku pada umumnya mengandung klausula yang tidak setara antara pihak yang mempersiapkan dan pihak lainnya.

d. Isi Perjanjian Kredit Setiap pemberian kredit harus dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis. Bentuk dan formatnya diserahkan oleh

Bank Indonesia kepada masing-masing bank untuk menetapkannya, namun sekurang-kurangnya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bank;
- 2) Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan-persyaratan kredit lainnya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit dimaksud. (Rachmadi Usman, 2001: 267)

#### **2.1.11 KUR Mikro**

Dalam Nurul Wardhani pinjaman dalam bentuk mikro kredit merupakan salah satu upaya ampuh dalam menangani kemiskinan. Hal tersebut didasarkan bahwa masyarakat miskin sebenarnya terdapat perbedaan klasifikasi diantara mereka, yang mencakup masyarakat yang miskin yakni mereka yang tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan ekonomi, dan masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Keuangan mikro adalah penyaluran jasa keuangan kepada rakyat kecil, lemah/miskin, dan para wirausaha. sejak tahun 1970, *microfinance* telah mengalami peningkatan dalam perkembangannya, dan dalam prakteknya merupakan penggabungan konsep pengembangan sosial dan ekonomi, juga merupakan atau sebagai prinsip yang mendasari promosi dan keuangan pasar/penjualan. Kombinasi ini telah membawa dampak jumlah pertumbuhan lembaga keuangan mikro yang berkelanjutan dalam pengembangan dunia.

Usaha Kredit Mikro adalah suatu istilah lain *micro credit*. Ada banyak pihak yang mencoba mendefinisikan sebagai berikut :

Grameen Banking mendefinisikan kredit mikro sebagai pengembangan pinjaman dalam jumlah kecil kepada pengusaha yang terlalu lemah kualifikasinya untuk dapat mengakses pada pinjaman dari bank tradisional (wardoyo Hendro Prabowo. Model Pengelolaan dan Pengemangan Kredit Mikro Koperasi Warga Tiara Kusuma Jakarta)

Bank Indonesia mendefinisikan kredit mikro sebagai kredit yang diberikan kepada para pelaku usaha produktif baik perseorangan maupun kelompok yang mempunyai hasil penjualan paling banyak Rp 100 juta per tahun. Sementara oleh BRI mendefinisikan kredit mikro sebagai pelayanan kredit dibawah 5 juta (Ashari. Potensi Lembaga Keuangan Mikro dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya).

Dalam Skripsi Tika Nur Atin (2018), Penerima KUR Mikro adalah individu/perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif. Dan penempatan dana berupa Kredit Modal Kerja dan atau investasi dengan plafond sampai dengan 25 juta per debitur dengan:

- a. Kredit Modal Kerja (KMK) jangka waktu maksimal 3 tahun
- b. Suku bunga sebesar 7% (tujuh persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara.
- c. Tidak dipungut biaya provisi dan administrasi
- d. Dalam hal skema pembayaran KUR Mikro, Penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan suku Bunga/Marjin KUR Mikro secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo

sesuai dengan kesepakatan antara penerima KUR dan Penyalur KUR dengan memerhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing penerima.

### 2.1.12 Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Menurut peneliti terdahulu Dewi Anggraini yang berjudul Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM Di Kota Medan (Studi Kasus Bank BRI) Penyaluran KUR diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan No 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat yang telah diubah dengan peraturan Menteri Keuangan No.10/PMK.05/. Beberapa ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemerintah dalam penyaluran KUR adalah sebagai berikut (suplemen 4, Serba-Serbi Kredit Usaha Rakyat, Bank Indonesia):

- a. UMKM-K yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha produktif yang *feasible* namun belum *bankable* dengan ketentuan :
  1. Merupakan debitur baru yang belum pernah mendapat kredit/ pembiayaan dan perbankan yang dibuktikan dengan melalui system Informasi Debitur (SID) pada saat permohonan Kredit/Pembiayaan diajukan dan/ atau belum pernah memperoleh fasilitas Kredit Program dari Pemerintah
  2. Khusus untuk penutupan pembiayaan KUR antara tanggal Nota Kesepakatan Bersama (MoU) Penjamin KUR dan sebelum addendum I (tanggal 9 Oktober 2007 s.d 14 Mei 2008), maka fasilitas penjaminan dapat diberikan kepada debitur yang belum pernah mendapatkan pembiayaan kredit program lainnya.

3. KUR yang di perjanjikan antara Bank Pelaksana dengan UMKM-K yang bersangkutan.
- b. KUR disalurkan kepada UMKM-K untuk modal kerja dengan ketentuan :
1. Untuk kredit sampai dengan Rp. 5 juta, tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar atau setara 20-21% efektif pertahun.
  2. Untuk kredit di atas Rp. 5 juta sampai dengan Rp.500 juta, tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar atau setara 12-13% efektif pertahun.
- c. Bank pelaksana memutuskan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan penilaian terhadap kelayakan usaha sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat, serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

## 2.2 Kerangka pemikiran

Menurut Plano (2010:266) kerangka pemikiran merupakan inti dari suatu kegiatan penelitian yang berisikan dasar-dasar teoritis mengenai masalah-masalah yang akan diteliti. Kerangka pemikiran dalam ilmu pengetahuan empiris (ilmu politik dan ilmu pemerintahan) teori yang mengacu pada kaitan yang logis pada perangkat profesi yang memastikan adanya hubungan diantara variabel-variabel dengan maksud menjelaskan kedua-duanya. Teori ini juga mempunyai fungsi, yakni :

1. Kerangka pemikiran merupakan suatu alat untuk mencapai satuan pengetahuan yang sistematis.
2. Kerangka pemikiran pembimbing penelitian.

Kerangka pemikiran merupakan alur pemikiran dari penulis sendiri atau juga mengambil dari suatu teori yang dianggap relevan dengan fokus atau judul penelitian dalam upaya menjawab masalah-masalah yang dirumuskan masalah penelitian. Dalam rangka penelitian ini, penulis meneliti mengenai Implementasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Unit Tanjung Morawa. Dalam upaya menjawab rumusan penelitian, maka penulis mengambil teori Implementasi Kebijakan Publik dari Edwards III (1984: 9-10) mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni:

1. Faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan?
  2. Faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan?
- Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni:
1. Komunikasi : komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.
  2. Sumberdaya : Meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup (jumlah dan mutu), informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

3. Sikap birokrasi atau pelaksana : Disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana terhadap program.
4. Struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan dari teori Edward III diatas, peneliti dapat menjawab masalah-masalah dalam Implementasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Unit Tanjung Morawa.

### 2.3. Penelitian Sejenis

Penelitian sejenis digunakan untuk menghindari pengulangan kajian terhadap kajian dan hal-hal yang sama pada penelitian ini. Penelitian sejenis ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Gobel dalam jurnal Administrasi Publik, Vol 3 No 046. 2017 yang berjudul Implementasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat di BRI Unit Bahu Manado. Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian jurnal diatas adalah :

1. Kebijakan KUR di BRI Unit Bahu dilaksanakan dengan baik dan efektif. Pihak BRI Unit mensosialisasikan KUR secara efektif kepada masyarakat umum terutama kepada kelompok sasaran yang memiliki usaha mikro potensial pada semua sektor ekonomi yang ditetapkan dalam Permenko Bidang perekonomian RI Nomor 13 Tahun 2015, dan No.S.21a Tahun 2015 sebagaimana yang telah direvisi dengan surat Edaran No. S.21b Tahun 2015.
2. Jumlah sumberdaya manusia (karyawan) di BRI Unit Bahu yang ditugaskan untuk melaksanakan KUR sudah cukup memadai dimana para petugas itu memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan

di bidang tugas sehingga dapat melaksanakan tugas secara professional. Dengan implementasi kebijakan pelayanan KUR-Mikro nampaknya tidak menjadi persoalan karena tersedia sesuai yang dibutuhkan. Semua pemohon KUR-Mikro di BRI Unit Bahu yang memenuhi syarat dapat dilayani dan direalisasikan.

Model implementasi Edward III merupakan faktor penting keempat dalam implementasi kebijakan public. Struktur birokrasi ini mencakup dua aspek penting yaitu mekanisme atau standar prosedur pelaksana (*standart operating procedures* atau SOP), dan struktur organisasi atau pembagian kerja. Dikatakan oleh Edward III, bahwa “para pelaksana kebijakan mungkin telah mengetahui apa yang harus mereka lakukan, dan mereka memiliki sikap dan sumberdaya yang cukup untuk melaksanakan kebijakan, tetapi mereka mungkin akan terlambat dalam pelaksanaan kebijakan oleh struktur birokrasi yang menonjol, yaitu standar prosedur pelaksanaan dan pembagian kerja” (Edward III dalam Indiahono, 2010, dan Rusli, 2013), dalam Muhamad Gobel 2017.

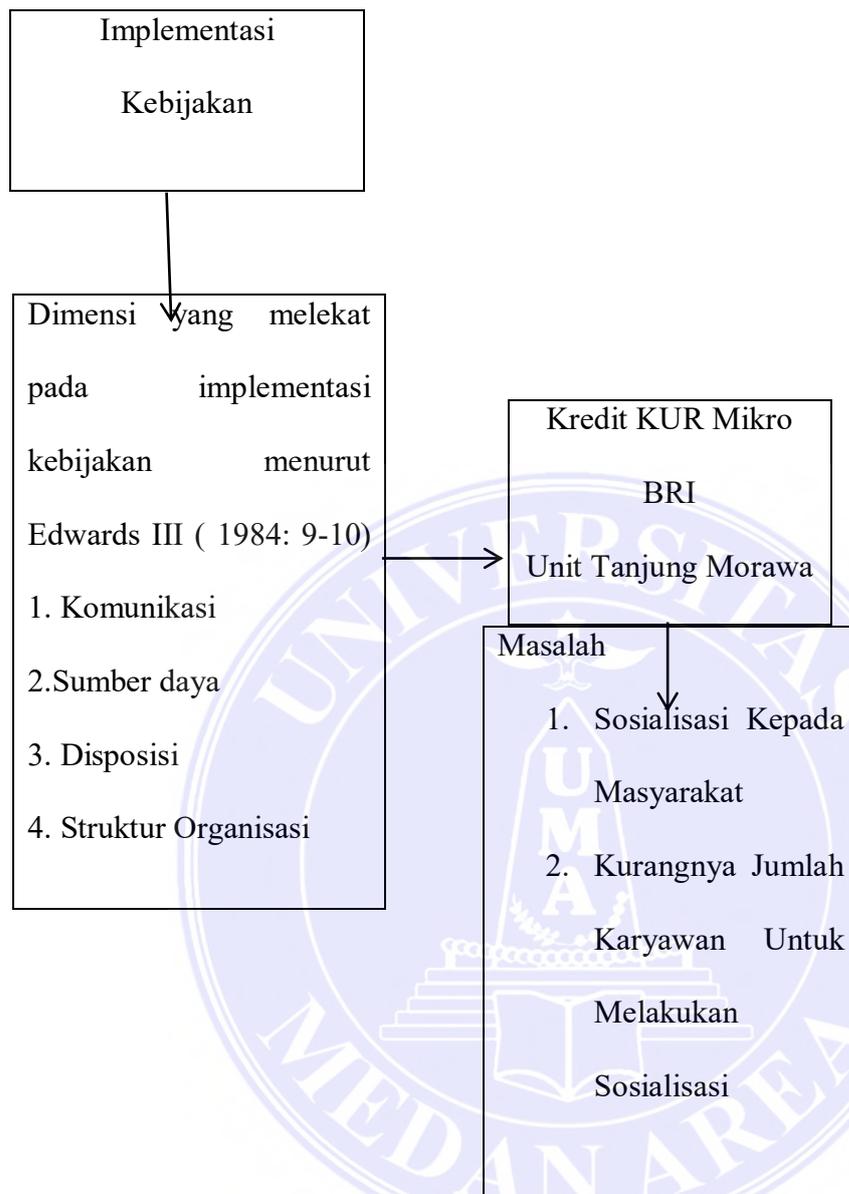
- a. Sumberdaya manusia untuk implementasi kebijakan KUR Mikro di BRI Unit Bahu tersedia secara memadai baik SDM karyawan maupun sumberdaya finansial/dana.
- b. Disposisi atau karakteristik yang dimiliki para pegawai pelaksana KUR Mikro di BRI Unit Bahu cukup tinggi dilihat dari tingkat kesediaan/komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan kebijakan KUR dengan efektif.

- c. Struktur birokrasi implementasi kebijakan KUR tertera dengan efisiensi dan efektif baik mekanisme dan prosedur (SOP) maupun pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan/program.

Penelitian sejenis yang kedua adalah penelitian oleh Dewi Anggraini dalam jurnal ekonomi dan keuangan vol 1 No 3, febuari 2013 dengan judul Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM Di Kota Medan (Studi Kasus BANK BRI). Dan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pendorong pengusaha UMKM mengambil KUR di BRI yaitu karena disarankan teman/keluarga, dan karena mengetahui suku bunga yang rendah.

Penelitian sejenis yang ketiga adalah penelitian oleh Hendy Arsyah Rahindra dalam jurnal kebijakan dan manajemen publik ISSN.2303-3411 vol 4 No 4 dengan judul Partisipasi UMKM Debitur KUR Mikro Oleh BRI Unit Wonocolo Kota Surabaya. Masih kurangnya partisipasi UMKM debitur KUR Mikro BRI Unit Wonocolo kota Surabaya dalam program-program KUR Mikro. Kurangnya partisipasi diakibatkan kurangnya komunikasi yang didapat oleh debitur KUR Mikro sehingga perilaku untuk berpartisipasi masih rendah.

## **Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang memerlukan pemahaman secara mendalam dan berfokus pada Implementasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Unit Tanjung Morawa beserta masalah dan kendala yang ada seperti kurangnya sosialisasi/ sistem promosi untuk peminjaman kredit usaha rakyat di BRI Unit Tanjung Morawa, supaya tidak terjadi kesalah pahaman dan para calon nasabah mengetahui cara pengambilan kredit usaha rakyat beserta syarat maupun ketentuannya.

Menurut Sugiyono (2006:15) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan data dengan triangulasi data (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil peneliti kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

#### **3.2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di BRI yang Beralamatkan di Jl. P. Kemerdekaan No.43, Kec, Tanjung Morawa Kab, Deli Serdang.

#### **3.3. Waktu penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2019/2020. Pada penelitian ini dimulai dari bulan oktober 2019 sampai dengan bulan September 2020.

### 3.4. Informan penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Informan kunci (*key informan*) yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Unit, di BRI Unit Tanjung Morawa, yaitu Bapak Undangenta Ginting S.E,M.M
- b. Informan utama yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Adapun yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah Karyawan survey lapangan BRI Unit Tanjung Morawa, yaitu Bapak Christiando Marbun S.E
- c. Informan tambahan yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat interaksi sosial yang diteliti. Yang menjadi informan tambahan dalam penelitian ini adalah Pelanggan/nasabah BRI Unit Tanjung Morawa, yaitu Ibu Badriah, Ibu Ros br.purba, Ibu Juariah, dan Bapak Ius Purba

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari lapangan, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data sesuai dengan jenis penelitian, adapun metode pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Kepustakawan

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, jurnal,

skripsi, tesis dan disertai, peraturan-peraturan, buku tahunan dan sumber-sumber tertulis.

b. Observasi

Observasi menurut Sugiyono (2015:203), “observasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan apabila penelitiannya berkenaan dengan tingkah laku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan apabila responden yang akan diamati tidak terlalu besar.” Dalam melakukan observasi peneliti harus terlebih dahulu meninjau ke lokasi ataupun tempat yang akan ingin diteliti yaitu BRI Unit Tanjung Morawa.

c. Wawancara

Wawancara menurut Esterberg dalam Sugyono (2015 : 318), “wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.”

d. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Arikunto (2006:158), “dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda dan sebagainya. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data berupa catatan, dokumen, transkrip, buku serta peraturan yang berkaitan dengan fokus penelitian ini untuk dimanfaatkan agar dapat menunjang penelitian ini.”

Dokumentasi menurut Sugiyono (2012 : 240) “dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang. Dokumen

yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan.”

### 3.6. Metode Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono (2012 : 244). “Analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain”

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Menurut Miles dan Huberman (2010:255) meliputi :

#### 1. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan upaya untuk mengumpulkan data dengan berbagai macam cara seperti : observasi, wawancara, dokumentasi dan sebagainya.

#### 2. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemulihan, perumusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan selama meneliti untuk memilih informasi yang mana yang dianggap menjadi pusat penelitian dilapangan.

#### 3. Penyajian data

Penyajian data yaitu sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Pengambilan data ini membantu penulis memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman. Alasan dasar di lakukan pada tahapan ini adalah menyederhanakan informasi yang kompleks kedalam suatu bentuk yang di sederhanakan dan mudah dipahami.

#### 4. Pengambilan keputusan atau verifikasi

Setelah data disajikan maka dilakukan pengambilan keputusan atau verifikasi. Dalam pengambilan keputusan atau verifikasi membuat kesimpulan sementara dari yang semula belum jelas menjadi lebih terperinci dengan cara di verifikasi dalam arti meninjau ulang catatan-catatan dengan maksud data yang diperoleh tidak valid untuk memperoleh jawaban atas masalah yang diangkat dalm penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Arikunto, Suharsimi. (1993). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.

Edward III, Goerge C (Edited), (1984), *Public Policy Implementing*, jai pressing London England

Hermansyah.( 2008). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenada Media

Kasmir, (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Mulyadi, Deddy.( 2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Bandung* : Alfabeta

Subagyo, Ahmad. (2017), *Kamus Istilah Perkreditan*. Jakarta : Mitra Wacana Media

Suharto, Edy, (2015). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta

Sugyono. (2006). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta

----- (2012) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D Bandung* : Alfabeta

----- (2015). *Metode Penelitian & Pengembangan Bandung* : Alfabeta

Sjahdeini, Remy, Sutan, (1993), *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta : Institut Bankir Indonesia

Tahir, Arifin.(2014), *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Bandung : Alfabeta

Tangkilisan, Nogi, Hesel, (2003), *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta :Lukman Offset.

Taswan. (2005). *Akuntansi Perbankan*. Makasar : UPP AMP YKN

Usman.Rachmadi (2008). *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika

Winarno, Budi, (2005). *Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Persindo

### Jurnal :

Anggraini Dewi , (2013), *Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM di Kota Medan ( Studi Kasus Bank BRI)* Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol 1 No 3 Febuari 2013. (Repository.usu.ac.id)

Gobel Muhamad, (2017). *Implementasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat Di Bank Rakyat Indonesia Unit Bahu Manado*. Jurnal Administrasi Publik, Vol 3 No. 046. (ejurnal.unsrat.ac.id)

Rahindra, Arsyah, Hendy. *Partisipasi UMKM Debitur KUR Mikro Terhadap Keberhasilan Implementasi Kebijakan KUR Mikro Oleh BRI Unit Wonocolo Kota Surabaya*. Jurnal Unair ISSN 2303.3411 Vol.4 No 4 (Repository.Unair.ac.id)

Wardoyo, Handoko, Prabowo, . *Model Pengelolaan dan Pengembangan Kredit Mikro Koperasi Warga Tiara Kusuma Jakarta* (Repository.gunadarma.ac.id)

### **Skripsi :**

Atin, Nur, Dwi, Atika. 2018. *Pengaruh Efektifitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Peningkatan Profit Usaha Mikro (Studi Kasus Pada Nasabah Bank Rakyat Indonesia Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta)* Repoditory.uny.ac.id

Ekawati, Dian. 2016. *Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Usaha Kecil Dan Menengah di Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai*. Repository.uin.ac.id.

Pinem, Julianus, Adrey. 2011. *Implementasi Kredit Usaha Rakyat Dalam Mengembangkan Usaha Kecil*. Repository.usu.ac.id

Wardhani, Nurul. 2010 *Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kuwarasan Cabang Gombang* Eprints.uns.ac.id

### **Internet :**

Arianti, Maya (2011, 15 februari) *Kredit Perbankan Indonesia*.

Ashari. *Potensi Lembaga Keuangan Dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya* (pse.litbang.deptan.go.id)

Bri.co.id. *Kredit Usaha Mikro* <http://id.shvoong.com/business-management/1988528-kredit>. <http://duwitmu.com> (8 nov 2019)  
KKBI.Kemedikbud.go.id

### **Undang-Undang:**

Undang- Undang No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008

Ardiansyah, Ramdani. "Inovasi Perpustakaan di Era New Normal." (2020).

## DOKUMENTASI PENELITIAN



Bersama Bapak Christiando Marbun S,E Pegawai Suvey Lapangan/Mantri BRI Unit Tanjung Morawa Pada Tanggal 10 febuari 2020



Bersama Ibu Badriah pedagang Mie Rebus pada tanggal 12 febuari 2020



Bersama Ibu Ros br purba pada tanggal 12 febuari 2020



Bersama Ibu Juariah Pada Tanggal 13 febuari 2020



Bersama Bapak Ius Saragih pada tanggal 13 febuari

# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estrel  
Kampus II : Jalan Gedabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A  
Website: www.ums.ac.id E-mail: univ\_medanarea@ums.ac.id  
No. (061) 736678, 7360108, 7364348, 7366781, Fax (061) 7366780 Medan 20222  
No. (061) 8201994, Fax. (061) 8228331 Medan 20122

150 /FIS.2/01.10/II/2020

Pengambilan Data/Riset

14 Februari 2020

Yth,  
Kepala Unit Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tanjung Morawa

Yang terhormat,

Sehubungan dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan persetujuan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :

Nama : Riri Novalina Peronica  
N P M : 168520039  
Program Studi : Administrasi Publik

Kami melaksanakan Pengambilan Data/riset ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tanjung Morawa, dengan judul Skripsi "*Implementasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Bank Rakyat Indonesia Unit Tanjung Morawa*"

Sehubungan dengan ini kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Oleh karena itu kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan pengambilan data pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,



Hadi Kusyanto, MA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area